

BUMN DI INDONESIA

Lolita L. Ririhena

Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon

Abstract: *BUMN as one of the economic actors known as UUD 45 is a powerful tool against the prevention of consumer exploitation by private units purely related to strategic products and the lives of many people. But the current economic crisis calls our attention to the management of SOEs which historically is a continuation of the world economy as well as the economy of the Dutch East Indies. This paper only briefly describes the structure and economic system of Indonesia which in turn encourages the political will of the political elites to be carried out consistently and consequently.*

Keywords: *BUMN, Bureaucracy*

PENDAHULUAN

Peta kehidupan bangsa di masa depan telah dituangkan dalam suasana perasaan, pemikiran, dan cita-cita pendiri Negara sebagaimana terungkap dalam pembukaan UUD 1945. Di sini nyata bahwa keyakinan filosofis tentang kemerdekaan sebagai hak semua bangsa, mendorong hasrat untuk membangun sebuah Negara yang merdeka disertai idealisme luhur, menjamin kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjamin perdamaian dunia yang abadi.

Kenyataan yang dihadapi bangsa kemudian lalu menjadi sebuah hal yang ironis memang, ketika keyakinan filosofis tentang kemerdekaan maupun

idealisme luhur terhadap tatanan sosial yang adil, makmur dan damai sering tidak terimplementasi secara benar, baik dan tepat. Kesemuanya ini mengarahkan bangsa kita kepada situasi krisis seperti yang terjadi saat ini di segala lini; monoter, ekonomi, politik, dst. Bagaimana hal ini dimungkinkan?

Krisis merupakan bagian dari eksistensi kehidupan. Krisis tidak hanya sebuah ancaman tapi juga sebuah peluang.. Banyak Negara dari bangsa manapun telah dilanda oleh semacam atau berbagai macam krisis. Namun tidak sedikit yang mampu bangkit dan secara kreatif menciptakan hasil yang berbeda ketika yang lain tetap terpuruk. Bagaimana sebuah krisis dapat menghasilkan dampak yang begitu berbeda bagi kelompok

yang satu dari pada bagi yang lainnya? Ini tentu saja menarik. Bila kita berasumsi bahwa keyakinan dan idealisme seharusnya memberi dasar pijak, motivasi dan arah yang bersifat menentukan terhadap hasil yang mau dicapai, lantas mengapa negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang dicap liberal, dalam urusan ekonomi dan politik misalnya, nampak lebih demokratis dan lebih mencerminkan jiwa dan semangat Pancasila serta UUD 1945 daripada bangsa kita?

Menjawab pertanyaan di atas, sektor perekonomian Negara menjadi titik tolak pembahasan mengingat munculnya krisis pada aspek ini dapat merambat kepada krisis baru pada berbagai aspek. Hal ini dapat dipahami dengan memperhitungkan bahwa tindakan manusia yang mengelola ekonomi ditentukan dan dibatasi bukan saja oleh apa yang ideal tetapi juga oleh apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan 'materialnya'.

Sejauh ekonomi terkait dengan kesejahteraan sosial dalam penciptaan masyarakat yang adil dan makmur, maka kepentingan rakyat menjadi kriteria yang dipertaruhkan terhadap kekuatan imbalan lain yang niscaya berdampak destruktif terhadap masyarakat luas.

Sementara itu pada tataran praksisnya kepentingan penguasa dan partai politiknya seringkali lebih dominant dan mengalahkan kepentingan publik tersebut. Pengelolaan ekonomi bangsa dengan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi menurut pasal 33 UUD 1945 tentulah menarik untuk diteliti sebab di dalam pasal ini tercermin jiwa dan semangat keseimbangan antara individu dan masyarakat yang pada hakekatnya bermuara pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Hatta, salah satu dari pendiri Negara ketika membicarakan ayat 2 dari pasal 33 menekankan secara eksplisit keseimbangan kedua asas tersebut yang dalam prakteknya tidak selamanya demikian. Dalam melaksanakan pasal 33 ayat 2 UUD 1945, pemerintah memberikan kepada BUMN monopoli dan komoditi serta jasa tertentu dengan alasan dan anggapan bahwa BUMN akan bersikap sosial dan tidak hanya komersial (UU no 9 tahun 1969) – kontras dengan gagasan Hatta yang lebih suka menghindari sisi komersial ini dan beranggapan bahwa hal itu lebih baik diserahkan kepada swasta (tidak semuanya) dengan intervensi peraturan.

Pada tahun 1985 terjadi badai isu swastanisasi BUMN. Hal ini terjadi

karena BUMN telah dinilai kurang efisien, kurang produktif dan harus mengikuti tuntutan zaman. Penilaian ini dapat dipahami mengingat ada begitu banyak cabang produksi yang dikuasai oleh Negara dari yang vital hingga yang tetek bengek karena pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di masa lalu. Isu swastanisasi BUMN adalah tak terelakkan, namun kemudian menjadi sebuah kekhawatiran terkait isu SARA.

Pemikiran yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam hal ini khususnya dalam upaya menganalisis krisis yang melanda bangsa kita. Weber berasumsi bahwa setiap tindakan selalu berdasar pada sebuah sistem makna dimana sistem itu bertumpu pada sebuah sistem nilai. Weber dalam hal ini melihat agama sebagai sumber dari sistem nilai dalam karya kontroversialnya, *Etika Protestan dan Roh Kapitalisme*. Menurut Weber, teologi protestantisme telah melahirkan sebuah etos yang sama sekali baru di dalam masyarakat Eropa pada umumnya yang pada gilirannya mengubah baik wajah Eropa maupun wajah seluruh dunia.

Bertolak dari asumsi inilah, perlu dicermati realita sosial masyarakat Indonesia sebagai komunitas yang

majemuk dalam sistem kehidupan berbangsa yang Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila perlu memosisikan diri secara terbuka dihadapan dua alternatif ideologi besar baik Timur maupun Barat. Namun didalam praktiknya ternyata kita jatuh pada satu sisi ekstrem dari kedua idealisme ini (liberalisme yang melahirkan kapitalisme) yang nampaknya telah jauh berkembang dan bertransformasi diri dari posisi awalnya. Dimanakah letak permasalahan ini? Nampaknya ada sebuah gap antara yang ideal dengan yang real.

Terdorong oleh keprihatinan terhadap apa yang sedang dihadapi, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan ini melalui upaya pendeskripsikan pengelolaan BUMN. Kajian ini menarik mengingat posisi BUMN sebagai *social overhead capital* yang berpengaruh terhadap daya saing ekonomi unit bisnis di pasaran global, tetapi terutama juga sebagai pelaku ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Melalui kajian dan analisis terhadap pengelolaan BUMN tentu dapat ditelusuri selanjutnya bagaimana politik

perekonomian memainkan perannya dalam penciptaan masyarakat yang adil demi menunjang penciptaan kesejahteraan rakyat banyak. Pengkajian terhadap eksistensi BUMN, bagaimana mengefisienkannya adalah diluar maksud penulisan ini. Di sini kajian tentang bagaimana politik perekonomian melaksanakan pasal 33 ayat 2 akan dideskripsikan, kemudian dianalisis untuk melihat apa yang sesungguhnya menjadi akar persoalan bangsa yang mendasar dibalik pengelolaan perekonomian negara. Analisis dalam penulisan ini sebagian besar berbasis pada kajian Christianto Wibisono dalam buku, *Menelusuri Akar Krisis Indonesia* (1999). Hasil analisis ini kemudian dikaji dalam perspektif teologis untuk dinilai dan dimaknai bagi sebuah perjuangan bersama dalam upaya praksis pentransformasian menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang pancasila.

ANATOMI BUMN

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 BUMN dibagi ke dalam tiga bentuk badan usaha yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Pemerintah beberapa dasawarsa lalu telah melakukan peninjauan strategis terhadap UU ini namun karena tinjauan tersebut bersifat teknis maka

jabaran terhadapnya sengaja penulis sisihkan agar lebih terfokus pada aspek-aspek substansial yang menjadi bahan kajian penulisan ini. Berikut akan diulas gambaran tentang BUMN dalam perkembangannya.

BUMN Generasi Pertama

Dalam perjuangan di era perang kemerdekaan maka pemerintah segera mendirikan embrio BUMN yaitu Bank Negara Indonesia CTC (Cikal Bakal Pantja Niaga) serta Pusat Perkebunan Negara. Bersama BUMN *public utilities* yang diserahkan dalam rangka perjanjian KMB seperti PJKA, PTT, dan cikal bakal BRI yang oleh PDBI (Pusat Data Bisnis Indonesia) disebut sebagai BUMN generasi pertama. Ciri-ciri BUMN generasi pertama ialah bersifat strategis dan dimodali oleh pemerintah dan dana yang maksimal bisa dikerahkan. BUMN generasi pertama didirikan oleh Pemerintah RI yang notabene memakai UUDS 1950 yang dituding liberal ternyata dalam pasal 38 UUDS-nya mengoper seluruh pasal 33 UUD 1945 secara sadar untuk membangun kekuatan ekonomi nasional yang mampu mengimbangi *The Big Three* bank Belanda dan *The Big Five Trading House* Belanda yang melanjutkan kembalinya struktur ekonomi Hindia Belanda secara

leluasa. BUMN generasi pertama secara strategis bertujuan mengimbangi MNC (*Multi National Corporation*) yang dalam kurun waktu itu merupakan raksasa oligopoly Belanda.

Sementara itu, untuk menciptakan kelas menengah usahawan swasta yang masih didominasi golongan keturunan Cina, Pemerintah menciptakan Program Benteng, menumbuhkan kapitalis golongan asli melalui pelbagai kemudahan kredit maupun lisensi impor istimewa. Di tahun 1950-an, Negara dan Pemerintah RI merasa bahwa untuk mengimbangi keturunan Cina yang ditumbuhkembangkan ialah wiraswasta asli Program Benteng, sedang kekuatan Negara yang memang lebih tangguh, diarahkan untuk mengimbangi MNC Belanda. Untuk membiayai dua program pembinaan kekuatan nasional BUMN dan Benteng itu Negara memiliki boom karet akibat perang Korea sehingga ekonomi Indonesia pada paruh dekade 1950-an cukup sehat dan kuat.

BUMN Generasi Kedua

Perkembangan sejarah internal maupun Bilateral Indonesia Belanda kemudian menghadapkan kita pada kepahitan pergolakan fisik pemberontakan PRRI/Permesta dan konfrontasi Irian

Barat. Sejak akhir tahun 1956 negara mulai mengambil alih seluruh perusahaan milik Belanda, bukan hanya *The Big Three* dan *The Big Five Trading House* serta onderneming Belanda, melainkan seluruh tetek bengkek usaha kecil dan perorangan milik Belanda disita mentah-mentah. Inilah yang merupakan populasi dari BUMN generasi kedua menurut terminologi PDBI.

Ciri-ciri BUMN generasi kedua adalah kelanjutan oligopolies *The Big Three bank* Belanda, serta segala macam perusahaan Belanda yang kecil dan remeh-temeh seperti bengkel mobil dan pabrik roti. Pemerintah Orde Lama sendiri kemudian kewalahan dan kelabakan mengurus ratusan perusahaan gurem sehingga memerlukan rasionalisasi dan restrukturisasi berulang kali sebelum akhirnya menyerahkan sebagian perusahaan tetek bengkek itu kepada provinsi yang akan menjadi cikal bakal BUMD dewasa ini.

Catatan penting mengenai BUMN generasi kedua dan Orde lama ini ialah perubahan radikal struktur BUMN yang tadinya mengandalkan kekuatan pasar menjadi struktur alokasi sektoral dan fungsional teknis menurut pola negara sosialis.

Pada periode Orde Lama ini juga

tampak sikap mendua dari rezim yang berslogan sosialisme. Oei Tiong Ham Concern disita seluruhnya, banyak tokoh bisnis dijatuhi hukuman mati seperti Liem koen Nio dari Surabaya atas dakwaan subversi ekonomi dan pemilik Bank Benteng Republik Indonesia karena delik cek kosong. Tapi sementara itu lahir trio pengusaha istana yang menjadi teman akrab Bung Karno menikmati lisensi istimewa yaitu Abdurachman Aslam, Bram Tambunan, dan Teuku Markam. Walaupun berstatus swasta, trio pengusaha ini memperoleh keuntungan besar dari akses kepada Bung Karno dan Yusuf Muda Dalam selaku Gubernur Bank Sentral juga menghambur kredit kepada kliiknya.

Pada periode ini yang menjadi sapi perah dan sumber dana ialah sektor perkebunan dengan menteri Drs. Frans Seda yang kantornya di jalan Imam Bonjol dijuluki Bank Sentral Bayangan. Sedang Bank Indonesia asli di Thamrin malahan pernah di-black list karena cek kosong di luar negeri. Pada periode ini terbukti bahwa salah urus, korupsi serta penggunaan dana untuk sektor kesenjataan dalam rangka Irian Barat dan ganyang Malaysia menyebabkan seluruh kekuatan ekonomi nasional Indonesia mengalami kemerosotan dalam

produktivitasnya di segala sektor. Pola spesialisasi BUMN-lah yang menjadi sebab utama gagalnya ekonomi nasional Indonesia mengganti peran struktur ekonomi kolonial Belanda.

BUMN Generasi Ketiga

Dengan pola spesialisasi BUMN itu, yang paling menderita ialah BUMN eks-*The Big Five* Belanda. Sebab PTP-PTP boleh langsung menjual komoditinya. Demikian pula BUMN industri boleh terjun langsung ekspor dan mendistribusikan produknya. Tidak heran jika PTP dan pabrik relatif bisa kembali berperan seperti zaman belanda begitu pula tiga bank Belanda, langsung menjadi raksasa BBD, BEIL, dan BDN serta eks-kontraktor Belanda, Adhi Karya, Hutama Karya, dan lain-lain juga tetap masuk ranking atas, Persero Niaga lesu darah dan tergeser oleh swasta.

Justru PTP Berdikari yang merupakan kelanjutan penyitaan harta karun eks trio pengusaha istana Orla survive dan tumbuh berkat pola konglomerat yang dianutnya. Karena itu PT PP Berdikari lolos dari yurisdiksi departemen sektoral dan langsung bberada di bawah Presiden. Berkat bentuknya yang diversified cum integrated itu PT PP Berdikari bisa

berfungsi mirip *The Big Five Trading House* Belanda, mempunyai pabrik-pabrik, bank dan asuransi, ekspedisi, perkebunan, dan jasa lain.

Ibnu Sutowo ketika menjadi godfather Pertamina juga memakai pola konglomerat untuk mengembangkan anak perusahaan menjadi bapak angkat untuk menumbuhkan wiraswasta pribumi. Terlepas dari malapetaka Pertamina yang masih misterius, Ibnu Sutowo berjasa dalam periode ini untuk mengubah *policy* BUMN sektoral/spesialis kepada konglomerasi BUMN. Pola konglomerat ini memang harus diambil karena kita berhadapan juga dengan mitra bisnis yang berwujud konglomerat seperti sogo shosha Jepang dan perusahaan MNC raksasa. Selama periode migas berlimpah ini lahirlah BUMN generasi ketiga.

Dalam konteks historis dan empiris, perkembangan ekonomi Indonesia telah melahirkan konglomerat swasta yang menikmati proteksi dan fasilitas khusus dan bebas bergerak ke bidang apa saja secara *integrated* dan *diversified*.

Dalam pemantauan PDBI setelah berakhimya era migas yang tampil ialah konglomerat swasta. Namun konglomerat

swasta ini memiliki dua tipe. Pertama, konglomerat yang lahir dari bawah melalui kerja keras dan persaingan pasar yang fair. Kedua, konglomerat swasta yang difasilitasi sehingga memiliki daya saing yang tidak fair (kelompok *ersatz capitalist*).

Dengan adanya quasi BUMN, yaitu swastanisasi BUMN secara diam-diam, peralihan kepemilikan BUMN dari Negara murni kepada swasta yang tidak jelas statusnya, yaitu yayasan milik pejabat dan dipimpin pejabat tapi berstatus swasta, melahirkan kemudian kelompok yang disebut BUMN generasi keempat.

Penelusuran terhadap manajemen BUMN dalam rangka mengkaji akar masalah perekonomian Negara, perlu dipahami dalam kerangka struktur dan sistem ekonomi Indonesia sebagai bagian dari sejarah dunia. Untuk itu deskripsi terhadap posisi mutakhir BUMN dalam sejarah perekonomian bangsa akan dikedepankan, menyusul pembahasan tentang citra BUMN, serta rekrutmen direksi BUMN sebagai indikator-indikator inefisiensi BUMN. Setelah itu barulah dibahas struktur dan sistem ekonomi kita, dari perspektif empiris-historis-ideologis untuk melihat apa sesungguhnya kekuatan dibalik pengelolaan perekonomian kita.

RESTRUKTURISASI PIRAMIDA EKONOMI INDONESIA

Dengan diambilalihnya perusahaan Belanda pada akhir demokrasi liberal, sebetulnya bangsa Indonesia melakukan lompatan jauh yang drastis, yaitu sekedar menguasai kedaulatan politik (melalui Proklamasi) sekaligus menguasai faktor produksi raksasa bekas jaringan perusahaan milik Belanda, yang merupakan pemegang kendali ekonomi Indonesia. Dengan demikian kendali ekonomi beralih dalam waktu singkat dari milik kolonial ke milik nasional.

Tidak heran bila terjadi kesemrawutan, karena pengambilalihan itu memang tidak dilakukan melalui proses alih-teknologi atau alih-manajemen yang dipersiapkan rapi. Situasi politik memaksa perwira-perwira ABRI, khususnya TNI/AD, untuk menguasai bekas perusahaan itu dan mengamankanya dari dominasi PKI melalui SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Dalam kondisi hiruk pikuk konfrontasi Irian Barat, yang makan biaya besar serta menimbulkan inefisiensi dari birokrasi pemerintahan serta kemerosotan alat produksi, BUMN di tahun-tahun Demokrasi Terpimpin pun mengalami gejolak bongkar-pasang dan regrouping terus menerus melalui

BPU-BPU serta perdebatan antara spesialisasi dan generalisasi.

Sistem sosialisme yang dipropagandakan oleh Bung Karno ternyata masih merupakan cangkokan dan gado-gado yang runyam. Favoritisme terhadap kelompok "pengusaha Istana", seperti Aslam, Markam, dan Bram Tambunan, ternyata masih diwarnai Ekonomi Terpimpin, dimana BUMN seharusnya diberi *leading and commanding position*. Karena faktor produksi yang terbengkalai, BUMN sekedar menjual lisensi dan memanfaatkan sistem distribusi, yang memang sudah berjalan sejak Hindia Belanda, yaitu eselon dua, pelaksana eceran dan menengah dari bekas *The Big Five*.

Pedagang nonpribumi yang secara tradisional sejak hindia Belanda memang merupakan perantara *The Big Five* Belanda, posisinya tetap ditengah sebagai perantara dari BUMN kepada konsumen. Dua pedagang raksasa nonpribumi, yaitu Oei Tiong Ham Concern (yang sudah menduduki ranking puncak sekelas *The Big Five* untuk ukuran Indonesia), disita oleh Bung Karno, sementara Liem Koen Nio dari Surabaya malahan dijatuhi hukuman mati (sesuai dengan situasi revolusioner anti subversi

ekonomi waktu itu). Sekalipun sedemikian revolusioner, Bung Karno tetap masih mempergunakan rasio dan tidak berkonfrontasi langsung dengan AS. Perusahaan Inggris memang dinasionalisasi, sehubungan konfrontasi dengan Malaysia, tapi perusahaan AS yang sebagian sudah bercokol di bumi Indonesia sejak Hindia Belanda, seperti Caltex dan Stanvac, BAT, Goodyear, Uniroyal, tidak diganggu gugat. Malah penandatanganan kontrak karya generasi pertama dilakukan oleh Chairul Saleh dan Caltex serta Stanvac di tahun 1963. Ini merupakan suatu pertanda bahwa seektrem-ekstremnya niatan ideologis Manipol, realitas ekonomi-teknologi serta finansial tidak bisa diabaikan.

Posisi utama dimana Negara mendominasi ekonomi (yang untuk sebagian bisa ditembus oleh pengusaha istana model Markam dan birokrat Yusuf Muda Dalam), dengan segenap inefisiensi sosial, politik, dan ekonomi, terguncang hebat dengan peralihan dari Orde lama ke Orde Baru. Kata kunci tahun 1966 adalah deetatisme.

Perusahaan Belanda dikembalikan sebagian kecuali PT Perkebunan, PT Niaga (eks *The Big Five* yang sudah babak belur), pabrik serta kontraktor, dan jasa-jasa lain. Seluruh perusahaan Inggris

juga dikembalikan, dan UU PMA harus mulai menghitung dari nol arus investasi baru ke Indonesia mulai tahun 1967, serta pemanggilan pulang devisa yang dimiliki penduduk Indonesia yang lari dan bermukim di luar negeri kembali ke Indonesia melalui UU PMDN 1968. Sistem kontrol devisa dihapuskan, dan lalu lintas devisa bebas merupakan salah satu daya tarik bagi investor asing maupun pemilik dana di dalam negeri.

Tampaknya struktur ekonomi Indonesia sedang kembali kepada pola dengan piramida puncak ekonomi adalah perusahaan yang berkekuatan raksasa memegang kendali terhadap produk strategis. Unsur PMA memang memiliki kekuatan canggih, baik dari segi teknologi maupun finansial. Karena itu, unsur negara walaupun di tengah gelombang deetatisme pertengahan dekade 1960-an, sebagian besar tetap survive dan eksistensinya terus berlanjut hingga dekade 1970-an. Golongan swasta nasional mulai turut memegang porsi dan naik kelas dari pedagang biasa menjadi pabrikan dan investor untuk sektor manufacturing, berpatungan dengan PMA ataupun langsung PMDN.

Pada perkembangan 1967-1973 terjadilah suatu proses penyusunan Piramida Ekonomi Indonesia yang

memperlihatkan mulai membesarnya porsi swasta, disertai berkurangnya peranan unsur Negara dan lembaga kolektif seperti koperasi. Dibarengi dengan munculnya Jepang sebagai investor terbesar untuk produk barang konsumsi sehari-hari, lengkaplah sudah persepsi tentang dominasi ekonomi Indonesia oleh kekuatan asing (Jepang) dan keturunan asing (nonpribumi).

Dibumbui oleh konflik politik internal antara figur elit puncak Indonesia, meletuslah malari dengan rentetan kebijakan "pribumisasi" sebagai koreksi terhadap proses 1967-1973, yang dianggap secara "liberal" menguntungkan golongan yang lebih terampil dan lebih siap karena warisan dan tradisi masa lalu, yaitu pengusaha keturunan Cina. Koreksi ini dapat berjalan mulus, karena Negara mempunyai kekuatan baru yang tumbuh dari boom minyak pertama sejak tahun 1973. Negara mempunyai kekuatan finansial yang cukup untuk kembali menjadi lokomotif pembangunan dengan hasil migasnya. Pertamina menjadi sinterlas dan godfather untuk tumbuhnya kekuatan bisnis nasional (dan pribumi) dekade 1970-an. Malapetaka Pertamina tahun 1976 tidak mengurangi kelanjutan politik pemerataan, karena harga minyak tetap

stabil dan meningkat terus. Sementara itu hukum alam berjalan sendiri dengan konsekuensi yang baru terasa 10 tahun kemudian.

Bangkitnya kekuatan OPEC dan senjata minyak telah dijawab dengan konservasi dan diversifikasi, sehingga ekonomi dunia mengalami kontraksi dan kemudian resesi, sementara peranan OPEC berkurang dan harga minyak pun merosot hebat. Indonesia kemudian mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran maupun dalam neraca perdagangan nonmigas (yang defisit). Karena itu Negara tidak mungkin melanjutkan peranan seperti yang dilakukan sejak 1974. Deregulasi telah diawali sejak paket kemudahan ekspor nonmigas Januari 1982. Tapi kecepatan efisiensi deregulasi dan arus kemerosotan harga minyak rupanya sangat berbeda; yang satu lamban sekali, sementara harga minyak merosot tajam. Dengan posisi keuangan yang sangat sulit, pemerintah terpaksa berpaling kembali kepada sektor swasta dan masyarakat, untuk memainkan peranan lebih besar dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Dr. Siswanto Sudomo dalam diskusi CPS (*Centre For Policy Studies*) menyatakan bahwa sekarang ini sudah

tiba waktunya untuk mengoreksi mekanisme alokasi faktor produksi, yang dulunya berdasarkan asas favoritisme (pilih kasih) sehingga alokasi sumber produksi itu menimbulkan inefisiensi, dengan mengembalikannya kepada mekanisme pasar (siapa paling efisien dan produktif, merekalah yang berperanan dalam ekonomi).

Setelah melewati berbagai periode pergolakan ekonomi, tentu citra BUMN di mata publik dan rekrutmen direksi menjadi indikator yang perlu ditelusuri dan diperhitungkan walau di sini persoalan manajemen BUMN di tempatkan dalam kerangka yang seproposional mungkin.

CITRA BUMN

Ketika masyarakat menderita demam saham dan antre di kantor broker untuk mendapat formulir, maka di DPR juga terlihat kesibukan para menteri mondar-mandir rapat kerja dengan DPR menjelaskan mengenai posisi BUMN dalam lingkup masing-masing. Menteri Pertanian misalnya melaporkan bahwa ada 6 BUMN Pertanian yang memperoleh kriteria sangat sehat dan bisa dipertimbangkan untuk go public. Dari sisa 30 buah, 10 buah sehat, 5 kurang sehat dan 15 tidak sehat. Secara

keseluruhan sebetulnya Menteri Keuangan ketika melapor kepada Presiden soal BUMN memang menyebutkan bahwa sekitar 2/3 dari 208 BUMN berada pada kategori kurang sehat atau tidak sehat menurut kriteria RLS SK Menkeu 740/1989.

Menurut penelusuran historis dan empiris, sebetulnya salah satu kesalahan terpokok dari SK Menkeu 740/1989 ialah kecenderungan teknokratis sempit, ukuran teknik pembukuan dan akuntansi yang dipakai untuk menguji, menyeleksi, dan memvonis nasib BUMN secara uniform, sehingga SK Menkeu itu sebetulnya tidak memiliki atau mengandung jiwa dan semangat pasal 33 maupun UU No. 9 tahun 1969. Selain itu SK Menkeu menyamaratakan seluruh BUMN, apakah itu bersifat public utilities dan public services dengan perusahaan bersifat komersial. SK tersebut juga kurang memperhatikan universalisme *textbook* yang di negara liberal pun mengakui Fungsi khusus *public utilities*, yang membedakannya dari lembaga komersial.

Citra BUMN tidak efisien, tidak sehat, tidak produktif, tidak kreatif, dan tidak melayani konsumen secara bertanggung jawab memang muncul akibat kinerja kualitatif yang mineur

dari BUMN public utilities. Sebenarnya banyak hal di dunia ini bersifat universal, termasuk masalah BUMN. Tapi mengapa justru di negara liberal, public utilities lebih baik dibanding negara sosialis atau Dunia Ketiga.

Yang membedakan BUMN negara liberal dengan BUMN negara sosialis atau Dunia Ketiga adalah BUMN liberal dikontrol ketat oleh DPR, pers dan masyarakat. Sedang di negara berkembang manajemen BUMN direstui dan didukung oleh birokrasi penguasa yang uber alles dan dominant hingga masyarakat konsumen tidak berdaya untuk mengoreksi atau menuntut pelayanan dan tarif yang layak.

Setiap kritik terhadap BUMN dianggap identik dengan kritik terhadap penguasa politik. Misalnya kritik Mochtar Lubis terhadap Pertamina, malah diberangus. Padahal 2 tahun setelah Indonesia Raya dibreidel, pada tahun 1976 terungkap malapetaka Pertamina dengan utang 10 milyar dollar AS. Seandainya kritik Mochtar itu didengar dan diusut, barangkali negara bisa menghemat 10 milyar dollar AS dari utang yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia keseluruhan. Malapetaka Pertamina ini pasti punya andil dalam melahirkan stereotip bahwa

BUMN Indonesia penuh resiko mismanajemen. Bersama dengan citra keburukan pelayanan BUMN *public utilities*, malapetaka Pertamina ini memperkokoh citra negatif tentang seluruh BUMN.

REKRUITMEN DIREKSI

Sejak nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada 1957, gelombang intervensi pemerintah seakan tidak pernah surut hingga kini. Intervensi ini cenderung menjadikan BUMN sebagai 'sapi perah' bagi kalangan birokrasi dan partai, ketimbang menjadikan BUMN sebagai salah satu pilar yang kokoh bagi perekonomian bangsa. Intervensi melalui penempatan direksi di sejumlah BUMN menjadi sebuah indikator adanya kepentingan antara birokrasi dan partai. Walaupun sejak era reformasi ada perbaikan dalam proses rekrutmen ini, yakni dengan dilibatkannya DPR dalam proses rekrutmen dan pengajuan syarat fit and proper test bagi setiap calon direksi, namun tetap saja perekrutmen belum sepenuhnya transparan dan objektif. Justru "penampakan" yang mengemuka di mata publik adalah peran dominan kementerian BUMN dalam setiap pengangkatan dan pemberhentian jajaran direksi BUMN. Akibatnya, proses rekrutmen tersebut tidak menghasilkan

direksi yang tangguh dan profesional. Adanya direksi yang diskualifikasi seperti ini merupakan indikasi lain merosotnya kinerja pengelolaan BUMN. Bila BUMN dijalankan secara inefisien maka kerugian bukan saja berdampak pada APBN (dengan kata lain, hanya mampu menghasilkan setoran bagi kelompoknya saja) tetapi akan terus bermuara pada terganggunya kesejahteraan rakyat yang semakin menampakkan keresahan dan persungutan. Kemauan baik pemerintah melalui penegasan presiden SBY pada saat membuka BUMN Summit untuk tidak menitipkan "orangnya" dalam jajaran direksi di semua BUMN, merupakan sebuah penjelasan terhadap fenomena pengelolaan BUMN yang tidak efisien selama ini.

Kajian Empiris-Historis-Ideologis tentang Struktur dan Sistem Ekonomi Indonesia.

Struktur dan sistem ekonomi Indonesia sekarang ini merupakan bagian dari ekonomi dunia serta kelanjutan dari ekonomi Hindia Belanda. Kita tidak dapat menghindari faktor subyektif pandangan hidup bangsa dan elite pimpinan bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan ekonomi Negara, dengan tidak mengurangi realisme pahit

bahwa mereka pun tidak bisa memotong jalur sejarah serta kaitan ketergantungan di luar Indonesia.

Karena perjalanan Negara berkembang termasuk Indonesia, pernah mengalami penjajahan yang kemudian diidentikkan dengan kapitalisme sebagai produk atau biang keladi yang melahirkan nafsu kolonialisme dan imperialisme dari bangsa-bangsa Eropa Barat, akibat langsung dari trauma itu adalah bahwa elite bangsa terjajah, yang bangkit memimpin perlawanan politik terhadap kekuasaan kolonial umumnya mempunyai pandangan yang bias, apriori, anti terhadap segala sistem yang dianggap menjadi sebab pola penghisapan kolonial.

Sistem ekonomi dan bisnis di Eropa telah dianggap tidak manusiawi dan terlalu individualistis sehingga para pemimpin elite Negara yang baru lahir setelah perang dunia II (untuk Asia dan Afrika) lebih condong kepada pola kolektivitas yang dipelopori oleh Marx dan Marxisme. Karena Amerika Latin yang secara politis telah merdeka di akhir abad ke-19 kemudian juga gagal dalam membangun suatu mekanisme kontrol demokratis terhadap kapitalisme, maka muncul tokoh ekstrem seperti Fidel Castro dan ideologi Dunia III (*dependency theory*, yang ingin

memutuskan ketergantungan dari dunia barat, tanpa jelas bagaimana menjalankan kemandirian mereka).

Dengan latar belakang historis semacam itu, tidak heran bila di Negara berkembang termasuk Indonesia sebetulnya lebih sentimen secara dominan pada bentuk kolektivisme (sosialisme) melalui unsur Negara dibanding dengan membiarkan pola ekonomi liberal yang kapitalistis. Sentimen tersebut tentu saja dapat dimaklumi sepanjang mereka mengalami trauma penindasan kolonialisme, yang bertumpu pada kapitalisme yang primitif dan primordial tersebut.

Di negara asalnya sendiri, kapitalisme itu setelah dihadapkan pada tantangan Marxisme di Eropa Timur, kemudian mengadakan operasi mawas diri yang luar biasa untuk mencegah revolusi sosial. Mereka mengadakan reformasi, pemberian jaminan sosial yang memadai kepada buruh, disertai demokrasi politik guna mengontrol, mengendalikan, dan mengarahkan sistem kapitalis agar tidak menindas bagian terbesar rakyat. Unsur negara memainkan peranan juga di negara Eropa Barat, dimana sebagian perusahaan juga dikuasai oleh Negara, sepanjang itu menyangkut

hayat hidup orang banyak misalnya, pos, listrik, gas, dan kereta api.

BUMN dengan demikian memang merupakan salah satu alat yang ampuh untuk mencegah penguasaan hayati hidup orang banyak oleh unit swasta murni, yang dikhawatirkan akan mengeksploitasi konsumen untuk keserakahan pemilik. Yang menjadi ciri pokok perbedaan BUMN Eropa Barat dan BUMN Negara berkembang termasuk Indonesia ialah bahwa BUMN di Negara Eropa Barat disoroti secara kritis oleh lembaga demokratis dan legislatif seperti, DPR, Pers, lembaga konsumen, sehingga mereka harus beroperasi secara profesional dan penuh dedikasi kepada konsumen yang memerlukan pelayanan.

Di negara berkembang, karena demokratisasi berjalan seret, manajemen BUMN dianggap merupakan bagian dari elite birokrasi. Dan elite birokrasi di negara berkembang adalah "pemegang kekuasaan manunggal" dan karena itu tidak bisa diganggu. Negara berkembang tidak mengenal oposisi, kurang menyukai kontrol dan alergi terhadap segala sesuatu yang bersifat menyoroti secara kritis.

Berikut ini akan dideskripsikan

bagaimana implementasi politik perekonomian terkait dengan pasal 33 UUD 1945. Bila kita menengok pada sejarah umat manusia tidak memandang bangsa manapun, selalu diterima suatu aksioma bahwa kepala suku, sunan, raja, dan kaisar, serta kerabat dan sanak saudara penguasa politik pasti akan kaya raya karena memang tidak ada dan belum ada pemisahan antara harta milik pribadi/keluarga raja penguasa feodal dan kekayaan yang seharusnya di-"buku"kan sebagai milik negara.

Pemisahan harta milik keluarga raja atau penguasa baru dengan kekayaan negara — terkenal sebagai *conflict of interest's resolution* — dimulai dengan lahirnya nation-state dan bentuk republik, yang sekaligus membedakan dunia lama dengan Eropa modern Pasca Revolusi Perancis. Doktrin pemisahan ini menghendaki pertanggungjawaban kekayaan negara dan tidak mencampuradukkan harta milik pribadi dengan budget negara. Lebih jauh lagi, pejabat juga dilarang untuk berbisnis agar tidak merancukan wewenang politiknya untuk kepentingan komersial. Sementara itu di Indonesia, kita mengenal istilah komersialisasi jabatan yang secara moral ditentang dan diharamkan tapi secara faktual masih merajalela.

Dalam membahas kekuatan ekonomi Indonesia maka jelas bahwa selama beberapa dekade telah lahir dan tumbuh kekuatan ekonomi yang mengandalkan kekuatan politik yang jatuh bangun bersama runtuhnya rezim lama seiring dengan pergantian penguasa politik. Inilah salah satu kekurangan dan kelemahan pokok Indonesia yang sebetulnya memang merupakan penyakit seluruh bangsa lain dari Dunia Ketiga yang belum mampu menerapkan doktrin *conflict of interest's resolution*, pemisahan ketat antara kepentingan elite politik yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan komersial.

Dalam jargon kaum strukturalis dan transformis yang dikutip Sritua arief, sistem ekonomi Dunia Ketiga melahirkan hanya *beraucrat capitalist*, *crony capitalist*, dan *comprador capitalist*. *Beraucrat capitalist* ialah penguasa yang merangkap menjadi pengusaha, menyalahgunakan wewenang melalui familinya. Sedangkan *crony capitalist* ialah kolaborator atau antek dari elite penguasa yang memperoleh proteksi dan lisensi istimewa dari pemegang kuasa. *Comprador capitalist* jelas merupakan peninggalan kaum Marxis ortodox yang anti modal asing

dan kapitalisme multinasional. Ketiga jenis capitalist ini oleh Prof. Kunio Yoshihara dari Kyoto University, dijuluki ersatz capitalist. Kapitalis semu yang berjaya karena faktor ekstern (politik, lisensi, kolaborasi agen MNC) dan tidak memiliki spirit murni dari kapitalis sejati.

Secara realistis kita harus mengakui bahwa kita masih merestui, menerima dan mengukuhkan doktrin kapitalis semu. Akibatnya muncul konsentrasi kekuatan ekonomi yang oleh masyarakat dianggap tidak fair dan tidak sehat karena tumbuh dari proteksi, lisensi istimewa dan monopoli yang direstui elite. Konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok ersatz capitalist ini yang walaupun grupnya terbatas, tapi akumulasi dananya jauh melebihi kekuatan ekonomi pasar inilah yang menjadi rahasia sumber keresahan dan kegelisahan masyarakat.

Dari bank data PDBI (Pusat Data *Business* Indonesia), ada 12 konglomerat yang nilai sales-nya tahun 1988 melebihi Rp. 1 Trilyun. 4 grup berasal dari ersatz atau menikmati salah satu jenis proteksi monopoli dan 8 grup berasal dari bawah antara lain Gudang Garam, Djarum, dan Mantrust. Selusin konglomerat trilyunan ini menguasai 1/3 dari total sales 300

konglomerat yang dipantau oleh PDBI. Total sales dari 300 grup ini menurut estimasi PDBI mencapai Rp. 69,8 trilyun sementara asetnya Rp. 48,7 trilyun. Sekitar 263 grup merupakan genuine capitalist yang merangkak dari bawah antara lain kretek, pangan, dan media massa.

Walaupun yang berstatus ersatz hanya berjumlah belasan namun proteksi serta pelestarian pola ersatz yang sudah berlangsung hampir satu generasi, menjadikan kekuatan ersatz ini manja dan tidak mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan produktif tulen. Walau hanya sebagian kecil dari ersatz capitalist ini yang kemudian mampu bersaing di pasaran bebas secara fair, namun sebagian terbesar selalu menuntut proteksi dari negara/pemerintah sehingga bertentangan dengan asas ekonomi yaitu laba dari produksi dan bukan menumpuk duit dari lisensi istimewa. Swasta jenis ini bila ditawarkan BUMN tentu akan menggerogoti kas Negara sebab sekalipun memiliki dana raksasa (karena proteksi) namun belum terbukti memiliki efisiensi dan produktivitas bila dilepas di pasaran bebas.

Kekuatan ersatz Indonesia menurut pemantauan PDBI masih terus menggerogoti sistem ekonomi nasional

kita secara tidak fair dan tidak efisien. Kekuatan ersatz yang terus-menerus minta proteksi dan lisensi istimewa ini niscaya tidak mempunyai fungsi positif dalam pembangunan ekonomi dan malahan mempunyai andil dalam keresahan dan instabilitas sosial politik. Ersatz *capitalist* ini tidak mempunyai kecanggihan daya saing dan daya gempur yang standing dengan genuine *capitalist*.

Berkaitan dengan fenomena ersatz *capitalist* yang menurunkan derajat dan fungsi politik dari hakikatnya sebagai pengarah kebijakan ekonomi yang membela kepentingan rakyat banyak, sistem politik negara berkembang termasuk Indonesia, mengandung kelemahan prinsipil dimana penguasa politik yang seharusnya bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ekonomi demi kepentingan masyarakat, malah selalu mengambil keputusan atas pertimbangan untung-rugi pribadi dan klik penguasa yang cupet.

Situasi demikian hanya melahirkan segelintir ersatz *capitalist* dan menimbulkan alienasi dari sebagian rakyat sehingga rakyat tidak berprestasi secara maksimal. Sebagai akibatnya tampak dari posisi ketergantungan Utang Dunia Ketiga yang semakin serius, karena potensi nasional tidak dikelola secara

jujur dan efektif, melainkan subjektif demi status quo penguasa politik yang mengeksploitasi posisinya untuk kepentingan komersial, yaitu berdagang dengan "senjata izin".

Dalam soal monopoli, terdapat pula monopoli yang ditunjuk di luar BUMN untuk komoditi yang mestinya bisa tersedia secara bebas, tetapi diproteksi dan diharuskan melalui monopoli tertentu. Dengan demikian telah terjadi suatu penyimpangan prinsipil dari UUD 1945 dan jiwa semangat Pancasila. Sebab dengan demikian selera dan putusan politik pemegang kekuasaan atau birokrasi untuk kurun waktu tertentu dapat dan boleh mengambil putusan untuk memberikan monopoli di luar pasal 33 kepada pengusaha tertentu. Dengan adanya pola monopoli sepihak yang tidak sejiwa dengan pasal 33 UUD 1945 itu, pemerintah justru secara tidak langsung menciptakan dan melahirkan kekuatan-kekuatan konsentrasi bisnis raksasa, yang dalam jangka panjang dapat merajalela ke segala bidang bisnis, mendikte konsumen dan rakyat dengan tarif sepihak, yang tidak mencerminkan kekuatan pasar bebas, tetapi pasar yang telah mengalami distorsi.

Karena putusan monopoli diambil berdasarkan selera dan keputusan politik

pemegang kekuasaan atau birokrasi, maka keputusan itu serta merta harus dianggap sah, afdol, dan tidak boleh dikecam. Inilah yang telah terjadi dalam proses pembangunan ekonomi selama 25 tahun PJP I. Tapi harus dicatat pula, bahwa di tengah merajalelanya bisnis dengan sistem lisensi istimewa dan proteksi monopolistis, banyak juga kekuatan bisnis Indonesia yang mampu tumbuh dari kekuatan pasar bebas yang murni dari bawah (al, kretek, baterai ABC dan The Sosro yang mampu menyaingi dan menggosusur MNC dalam medan persaingan pasar bebas). Swasta jenis memang sepantasnya memperoleh apresiasi atas dasar motivasi, kerja keras, dedikasi, dan kreatifitasnya.

KESIMPULAN

Dari analisis empiris-historis-ideologis, nampak bahwa ketika kita menolak komunisme, kita menolak juga kapitalisme abad XX tapi malah terjerumus dalam kapitalisme abad XIX, yaitu gabungan antara feodalisme, birokratisme, dan kolusi antara birokrat dan kapitalis primitif yang pada gilirannya memungkinkan penciptaan lahan subur bagi praktek-praktek korupsi dan ketidakadilan. Sementara itu sosialisme ilmiah dari Karl Marx yang telah memperoleh penilaian ilmu

pengetahuan sebagai yang mengandung kebenaran, telah lama kita diamkan. Sebaliknya Pancasila yang seharusnya diterapkan secara murni dan konsekuen nampaknya dimanipulasi untuk mempertahankan status quo.

Mengapa demokrasi di Indonesia yang berakar pada Pancasila nampaknya tidak berjalan dengan baik? Mungkin sekali masalahnya terletak pada kepemimpinan yang tidak kuat, yang memanfaatkan Pancasila sebagai alat politik dan bukan sebagai nilai hakiki dalam berdemokrasi. Primordialisme menjiwai kepemimpinan dan mengalahkan nasionalisme. Inilah inti keresahan dalam dinamika kehidupan kebangsaan kita. Yang lebih parah lagi, dosa (baca: primordialisme) pada tataran individual semakin mengental dalam tataran struktural. Menjadi jelas bahwa setiap tindak kepengurusan yang tidak bertanggung jawab atau salah urus dalam sistem politik sosial ekonomi dalam praktiknya menunjukkan bukan saja telah terjadi sebuah pembiaran bahkan malah dibenarkan dibawah bendera Pancasila.

Berbaurnya kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi menimbulkan bahaya yang lebih besar dan serius. Kekuasaan politik yang seharusnya mengendalikan kekuasaan ekonomi demi untuk

melindungi kepentingan rakyat, kini menjadi amat sulit dilaksanakan karena kekuasaan politik itu sendiri telah pula menjadi kekuasaan ekonomi.

Dengan kata lain, institusi di dalam perbincangan ini tidak dapat dilepas-pisahkan dari oknum. Institusi adalah orang yang ada di dalamnya. Sebab itu persoalan kita tidak hanya pada tingkat struktural saja, tetapi juga sesuatu yang normal, amat manusiawi. Artinya, ketika seseorang memegang kekuasaan politik maka tidak sulit untuk memanfaatkan kekuasaannya itu untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi. Akibatnya tentu fatal bagi kehidupan ekonomi maupun politik.

Di dalam hal ini kita disadarkan bahwa institut tidak saja membutuhkan oknum yang baik, tetapi juga bahwa sistem dibutuhkan untuk mengatur, mengendalikan dan membatasi kemungkinan sisi korup dari oknum itu.

Bertolak dari uraian ini, disimpulkan bahwa masyarakat kita khususnya penguasa-penguasa ekonomi dan politik nampaknya telah berakar pada sebuah etos atau sistem makna yang lain. "Jiwa" atau sistem makna yang ada di dalam masyarakat kita sesungguhnya masih tetap feodalisme. Artinya,

sekalipun masyarakat kita tidak dikuasai lagi oleh raja atau bangsawan dalam arti formal namun secara fungsional itulah yang terjadi. Nilai-nilai yang dominant dalam masyarakat feodal masih terus beroperasi di dalam struktur kehidupan berbangsa kita.

Sistem makna inilah yang membentuk peri tingkah laku primordial yang memang telah ada pada tataran individual menjadi berkembang dan semakin mengental pada tataran struktural. Akibatnya, pengunggulan diri ataupun kelompok menekan dan menindas semangat dari asas-asas kehidupan berbangsa yang demokratis dan Pancasila. Sikap-sikap seperti tidak mau diganggu gugat, tidak mau dikontrol, bahkan tidak mengenal oposisi, adalah cerminan primordialisme individual pada tataran struktural yang mencuat, dan mengeras dalam penampakan otoritarianisme pada semua sisinya.

Pada gilirannya, sistem nilai budaya feodal yang tidak memisahkan kepentingan atau harta pribadi dengan kekayaan milik negara lalu menumbuhkan kekuatan ekonomi bisnis yang menyalahgunakan posisi politiknya dan kemudian melahirkan ersatz *capitalist*. Bila BUMN diswastanisasikan

di berikan kepada keluarga pejabat atau crony (yakni pengusaha ersatz) maka lingkaran setan pun tak terelakkan. Mengapa? Karena unsur primordialisme sudah tentu mengalahkan prinsip rasionalita, keadilan, kesetaraan, dan bahkan menguburkan jiwa nasionalisme dari para pejabat negara. Otoritarianisme yang berkembang dari primordialisme inilah yang menjadi sumber kegelisahan dan keresahan rakyat umumnya, melahirkan ketidaksetaraan, melanggengkan ketidakadilan, menciptakan kekerasan struktural dan akhirnya malah menindas demokrasi yang diidamkan bersama.

REFLEKSITEOLOGIS

Memang ironis bila menghadapi persoalan mendasar bangsa kita berhadapan dengan eksistensi bangsa lain (mis, Amerika, Inggris, Jerman, Jepang Korea, dst) dari hakekat kemanusiaannya. Dari segi ini, masing-masing komunitas di luar Indonesia, tanpa membedakan ras, bahasa, agama, tipe masyarakat, sanggup mengedepankan nilai-nilai yang mampu menciptakan kebaikan besar bagi sebanyak mungkin orang terutama bila mengarah pada kebijakan-kebijakan strategis internal terkait kepentingan nasionalnya. Sementara Indonesia, hingga sekarang

ini masih diwarnai dengan berbagai kegelisahan dan ketidakberdayaan masyarakatnya dan malah baru-baru ini menghasilkan mosi tidak percaya dalam demonstrasi masa yang besar di berbagai daerah, dipimpin oleh para pemuda dan mahasiswa. Dengan kata lain, rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap para pemegang kekuasaan.

Hilangnya kepercayaan rakyat membuktikan bukan saja kinerja pemerintah yang sarat dengan penyimpangan hukum tetapi juga menunjukkan sebuah kelemahan kepemimpinan. Meningkatnya beban hutang Negara, ditambah lagi dengan isu Bank Century yang melibatkan tiga pimpinan eksekutif Negara, kenaikan harga-harga sembako, isu-isu kenaikan harga BBM, PLN, PAM, transportasi, membanjirnya pasar bebas, ancaman PHK buruh secara besar-besaran (siaran RRI tanggal 29 Jan 2010 mengatakan bahwa khusus di Bekasi sekitar 30 ribu karyawan terancam PHK), menjadi beban tanggung jawab yang harus diterima, dan dipikul seluruh rakyat kecil.

Memang krisis ini perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas namun di dalam kerangka ini pula oknum-oknum perumus dan pengambil kebijakan memiliki peran yang menentukan.

Apalagi isu-isu yang mengemuka sebagian besar terkait dengan eksistensi BUMN. Diakui bahwa setiap pemegang kekuasaan dalam mengatur perekonomian memiliki berbagai keterbatasan sehingga seringkali perlu mengambil keputusan yang urgen dengan sedikit informasi yang tersedia yang pada akhirnya tidak dapat diprediksikan sama sekali bagaimana hasil akhirnya. Hal ini memang tak terelakkan dan perlu dipandang sebagai sebuah kewajaran dari sisi kemanusiaan kita terutama ketika keputusan yang mau dibuat itu memang telah dipikirkan secara seksama terlebih dahulu walau pada akhirnya berdampak buruk.

Walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa dibalik kewajaran ini, toh masih terdapat berbagai ketidakwajaran yang mesti diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat yang adalah sumber dari posisi dan kekuasaan politik. Namun segi tanggung jawab ini tidak dapat terlepas pula dari eksistensi manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam relasi ini, Allah memanggil, dan menempatkan manusia serta meminta pertanggung jawabannya di dalam kosmos-Nya. Itu sebabnya pemerintah

sebagai hamba Allah perlu mendengar dan meresponi secara benar, baik, dan tepat, keluhan dan aspirasi seluruh rakyat sebagai wujud solidaritas terhadap yang lemah dan tidak berdaya. Bukan bertindak sebaliknya, tidak mau digugat, tidak mau dikontrol, arogan, dan mementingkan diri sendiri.

Berbicara tentang Allah dalam bidang sosio ekonomi politik ini bukanlah suatu keanehan dalam kehidupan bangsa kita yang berpancasila. Sebab di dalam kerangka ini manusia Indonesia bukan hanya manusia yang ekonom, tetapi juga manusia dalam totalitasnya sebagai makhluk sosial dan agamis. Itu sebabnya berbicara tentang tanggung jawab, menghadapi manusia pada berbagai dimensi kehidupannya secara menyeluruh.

Kita (baca: Gereja) tidak dapat menutup mata terhadap hal ini. Namun sayangnya itulah yang terjadi. Ketika masyarakat mulai menyatakan diri dalam berbagai demonstrasi masa menuntut perhatian terhadap nasib, kebutuhan dan aspirasi mereka, memperjuangkan keadilan, gereja di Indonesia umumnya malah terkesan pasif.

Dalam konteks ini, Gereja telah tertidur ketika masyarakat bangsa terjaga dalam bahaya. Ketika masyarakat

menderita dan tidak berdaya, dan ketika kesadarannya disentuh dan dibangunkan oleh pihak-pihak yang lebih peka dan proaktif terhadap situasi ancaman yang ada, Gereja justru kehilangan fungsi kritisnya dan malah meninabobokan masyarakatnya melalui ajaran yang tidak menyeluruh tentang pemerintah sebagai hamba Allah. Ajaran tanpa memiliki keutuhan perspektif secara teologis tentang hakekat manusia ini menjadikan gereja terlena, sementara ajaran itu sendiri tanpa disadari malah mendukung status quo.

Terhadap kondisi ini (kecenderungan penguasa, baik pemerintah maupun Gereja) patut kita sesali. Bila situasi ini tidak ditanggapi secara benar, baik, dan tepat maka akan hadir pihak ketiga di tengah masyarakat yang akan memancing di air keruh sehingga keadaan dapat menjadi lebih buruk lagi. Pada akhirnya eksistensi bangsa maupun Agama-agama itu sendiri (baca: Gereja) dipertaruhkan sama sekali.

IMPLIKASI

Menghadapi persoalan besar ini apa yang mesti kita lakukan? Menurut hemat penulis, baik bangsa maupun gereja sama-sama membutuhkan restorasi, transformasi yang holistik. Baik pada tataran individual di tiap dimensi

kehidupannya hingga tataran struktural. Sebagai insan bangsa ataupun sebagai insan agamais, kita membutuhkan sebuah re-edukasi. Dan re-edukasi ini menjadi tanggung-jawab Negara pada satu sisi, sedangkan sisi lainnya menjadi tanggung jawab masyarakat.

Negara bertanggung jawab membangun sebuah sistem pendidikan yang mampu menghasilkan bukan saja pemimpin-pemimpin yang cerdas tetapi juga pemimpin-pemimpin yang pancasilais sebagai basis kekuatan pada tataran kebangsaan. Urgensi ini menuntut kemauan politik yang kuat yang benar-benar memprioritaskan pendidikan anak bangsa sehingga dalam hal tertentu ini pemerintah tidak begitu saja melemparkan tanggung jawabnya kepada swasta yang pada gilirannya hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin dengan pola-pola perilaku primordial.

Sementara itu Agama, sebagai kekuatan etis, moral, dan spiritual perlu memainkan peran sentralnya sebagai agen penyadaran diri dan transformasi baik pada tataran individual maupun sosial. Agama tidak terlepas dari oknum. Di sinilah terletak tanggung jawab para pemimpin agama, tapi juga pemimpin-pemimpin yang beragama; orangtua sebagai kaum pendidik, kaum guru, kaum

intelektual dsb, Sebagai penganjur-penganjur nilai-nilai etis, moral, dan spiritual, mereka mengemban fungsi keteladanan hidup, konkretisasi nilai-nilai agamais, dimana dunia ideal nilai-nilai teraktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Model pembelajaran hidup yang aktual inilah yang mampu menjadi kekuatan yang berdaya guna dalam menunjang proses pendidikan bangsa yang cerdas, kreatif, dan pancasilais ke depan.

Dibawah kepemimpinan Presiden Indonesia ke-7 tampaknya kepercayaan masyarakat bangsa ini mulai dipulihkan kembali di tengah amukan krisis dunia dan menerbitkan seberkas sinar harapan bagi Indonesia yang ber-Pancasila dan ber-UUD 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Sekretariat Negara republik Indonesia,1995. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kmerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Christianto Wibisono, 1999. Menelusuri Akar Krisis Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmy Radhi, 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika
- Magunwijaya, Y.B, menuju Indonesia Serba baru. Hikmah Sekitar 21 Mei 1998. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Yasni Z. 1978. Bung Hatta Menjawab. Jakarta: Gunung Agung.